



Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat



Entaskan Masalah Sosial

Guru Tak Lagi Berjasa, Benarkah?



Foto: arihan/k

Ada yang berbeda pada peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2020. Seperti umumnya peringatan di era pandemik Covid 19, HGN dilakukan secara daring. Hari guru bukan sebatas seremonial, esensinya mengingatkan peran penting dan jasa guru.

Mengusung tema “Bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar”, peringatan HGN 2020 memberi makna cukup dalam. Menggugah seluruh insan pendidikan agar berpikir untuk kemajuan. Terus berkreasikan dalam mewujudkan merdeka belajar.

Abad 21, guru bukan hanya dituntut mampu menyampaikan materi pelajaran. Namun harus menciptakan terobosan. Begitu pun peserta didik, mereka diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.

Era digitalisasi memunculkan pertanyaan “Apakah peran guru akan tergantikan?” Ada

pendapat yang menyebut bahwa guru termasuk profesi yang akan hilang. Benarkah demikian? Jika guru hanya dimaknai sebagai pemberi informasi dan pelajaran, bisa dibenarkan.

Digitalisasi seperti internet menyediakan informasi secara mudah dan cepat. Beragam aplikasi pembelajaran pun tersedia. Sehingga sumber informasi tidak hanya berfokus pada guru di ruang kelas.

Akan tetapi, konsep pendidikan bukan sekedar menempatkan guru sebagai informan. Ada peran lebih *urgent* sebagaimana filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. “*Ing ngarso sung tulodo, Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani*”. Filosofi bermakna bahwa guru memiliki peran penting pada setiap proses pendidikan. Ia menjadi model, inspirator, dan *superhero* bagi setiap anak didiknya.

Selamat Hari Guru.

Pembina/Penasehat :

H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Rudiana, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Teguh Rusiana Merdeka, SH
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Drs. H. Subhan
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Pengarah :

Muklisin Nalahudin, SH, MH.
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

Munawir, SH.
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

Abdul Rohman
(Ketua Komisi 1)

Mad Saleh
(Ketua Komisi 2)

H. Hermanto, SH
(Ketua Komisi 3)

Drs. H. Rasida Edy Priatna, MM
(Ketua Komisi 4)

Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi :

Ikin Asikin, S.Sos, M.Si
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

Wakil Pimpinan Redaksi :

Drs. Raden Chaidir Susilaningrat
(Kabag persidangan)

Drs. H. Sucipto, MM
(Kabag Perundang-undangan)

Redaktur Pelaksana :

Mochammad Nurhijana, S.STP., M.Si
(Kasubag Humas dan Protokol)

Redaksi Ahli :

S. Yudi

Penyunting :

Wiwin Winarti, S.IP
(Kasubag Rapat dan Risalah)

Ardiles Afia Jatiwanto
(Kasubag Rumah Tangga)

Redaktur :

IA Fazri

Reporter :

Firman • Maulana • Adi • Yusuf • Mahardika

Fotografer :

Alfian

Desain Grafis :

Boyke Datu • Andri

Data dan Riset :

Oman • Ihsan

Distribusi :

Adiw

Korespondensi :

redaksi.cika@gmail.com

Penerbit :

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon

• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



04 | FOKUS

Data PPKS Belum Mutakhir

10 | Perlu Program Konkret untuk PPKS



14 | KILAS

Mengkaji Inovasi Layanan Disdukcapil



18 | PUBLIKA

Jalan di Bawah Rel Astanajapura-Lemah Abang Rusak dan Langganan Banjir



20 | LENSA

Sendal kebarepan Pernah Berjaya, Kini Tinggal Dua



22 | DINAMIKA KOMISI

Pembangunan GOR Wanasaba Kidul Masih Belum Rampung

24 | Komisi II Pertimbangkan Penggunaan Cantrang

26 | Jembatan Babakan-Karangsembung Memprihatikan

28 | Komisi IV Kunjungi Layanan Terpadu Satu Atap PPPMI



30 | PROFIL

Fraksi PDIP Kabupaten Cirebon Berjuang untuk Wong Cilik!



33 | INSPIRASI

Dolanan Jamblang: Jadul tetap mantul

36 | POTENSI

Mimpi Lebak Mekar Menjadi Kampung Beduk

Data PPKS Belum Mutakhir

Dinsos Kabupaten Cirebon mengaku telah melakukan upaya pemberdayaan PPKS. Namun Dinsos menilai perlu memperbaharui data.



Foto: foto ihsan/ck

Berkunjunglah ke tempat wisata religi makam Sunan Gunung Djati Cirebon. Ironi akan tampak, destinasi kaya akan nilai, namun diliput masalah sosial: para pengemis, gelandangan, peminta-minta hingga fakir miskin.

Kondisi demikian, menjadi cerminan dan ketimpangan kesejahteraan bagi masyarakat di Ka-

bupaten Cirebon yang semuanya belum teratasi.

Negara mewajibkan untuk memujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk melakukan tindakan guna memenuhi hak-hak dari masyarakat.

Kewenangan tersebut, mer-

upakan bentuk partisipasi negara dalam hal mengupayakan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang merupakan amanah dari Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon pun, telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) PPKS.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Siska Karina, mengatakan Perda PPKS telah disahkan pada Juni lalu. Namun, implementasinya belum terlaksana. Siska bilang, karena sampai hari ini Perbup sebagai acuan teknisnya belum disahkan.

"Dinas berjanji 6 bulan setelah pengesahan Perda, akan secepatnya dikeluarkan Perbupnya. Maksimal Desember nanti. Kita akan tagih janjinya ke Dinsos dan Pemda," katanya.

Menurutnya, dengan pembangunan yang sangat cepat untuk ukuran Kabupaten Cirebon, saat ini berbeda dengan kondisi masyarakatnya yang banyak tergolong miskin. Perda PPKS di Kabupaten Cirebon kedepannya dapat mengatur segala permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan kondisi yang aktual.

Penyandang masalah sosial yang diatur dalam Perda diantaranya: anak jalanan, wanita tuna susila, tuna susila, gelandangan dan gelandangan psikotik hingga pengemis.

Siska bilang, implementasi Perda akan dapat dilihat pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang memperhatikan kesejahteraan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Sehingga terciptanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon.

Semua Elemen Terlibat

Namun, kata Siska, hal ini mungkir dilakukan tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat. Sehingga, perlu berbagai langkah. Pertama, dengan memperkuat jaringan antara Pemda, DPRD, para pengusaha dan masyarakat sebagai subyek pembangunan, agar terciptanya keserasian dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup, serta perlindungan dan pemberdayaan PPKS.

Kedua, memperkuat dinas dalam menindak seluruh elemen masyarakat yang melanggar Perda PPKS. "Kita ingin semua elemen itu terlibat, baik dari Pemda, DPRD, Dunia Usaha maupun masyarakat," paparnya.

Selain itu, peran perusahaan juga tak kalah penting. Siska bilang, peran CSR harus mampu membantu bersama-sama menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam menyelesaikan PPKS.

"Kita punya forum CSR, disebarlah dana sosialnya untuk membantu PPKS. Karena kita juga tidak bisa mengandalkan dari APBD pemerintah saja. Ini juga akan membantu program-program sosial perusahaan agar tepat sasaran," tegasnya.

Sejauh ini, Dinsos Kabupaten Cirebon telah melakukan berbagai program dalam upaya me-



Siska Karina

ngentaskan PPKS. Namun, Siska menilai belum maksimal. "Sebenarnya program sudah ada, sudah bergerak semua, tapi ya kita lihat belum optimal saja," katanya.

Kepala Sub Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Dra SA Shinta Dewi, mengatakan, dalam penyusunan program Dinsos tidak terlepas dari visi misi Bupati Cirebon sendiri. Yaitu, terwujudnya Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan pembangunan yang berkualitas.

"Menurunnya angka kemiskinan, meningkatkan taraf kesejahteraan, sudah tupoksinya kita di Dinsos," jelasnya.

Shinta bilang, Dinsos Kabupaten Cirebon telah melakukan berbagai program kegiatan untuk 2 sasaran. PPKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). "Implementasi sudah. Hanya nomenklatur saja yang berubah," katanya.

Sejauh ini, Dinsos telah bekerjasama dengan masyarakat dalam membina dan memberdayakan. Selain itu, Dinsos juga telah melakukan program rehabilitasi bagi penyandang disabilitas.

"Ada *outcome* dalam melaksanakan program, kita ingin PPKS melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Diantaranya ada Penyandang Disabilitas yang telah kami latih keterampilan misalnya. Itu tugas kita, supaya mereka bisa diterima kembali di masyarakat," ujar Shinta.

PPKS sendiri terbagi menjadi 26 kriteria. Na-



mun, kata Shinta, tidak semuanya Kabupaten Cirebon memiliki. Ia mengaku, sejauh ini hanya memberdayakan yang menjadi masalah krusial di Kabupaten Cirebon saja. Pertama, bagi anak jalanan dan anak terlantar. Dia mengaku telah melakukan program pemberdayaan stimulan dengan pemberian makanan pokok langsung, alat sekolah bagi yang tidak mampu, maupun bimbingan sosial.

“Yang masih sekolah kita kasih alat sekolah, yang tidak mau sekolah kita kasih pelatihan skill,” jelasnya.

Sedangkan bagi anak yang menjadi korban tindak kekerasan maupun pelecehan, Dinsos telah melakukan pendampingan pemulihan melalui

Pekerja Sosial (Peksos). “Saat ini baru ada 2 Peksos, tahun depan nanti kita akan bertambah calon Peksos yang saat ini masih tahap ujian,” paparnya.

Kemudian, bagi Fakir Miskin, Dinsos Kabupaten Cirebon juga telah memberikan kebutuhan dasar berupa bantuan pangan non tunai (BPNT). Selanjutnya, bagi perempuan rawan sosial ekonomi, Shinta bilang, telah memberikan pelatihan usaha dan bantuan modal awal. “Ada yang dilatih pembuatan kue, kita kasih oven sebagai stimulannya. Kemudian mereka pun berjualan,” katanya.

Selain itu, kata dia, Dinsos juga telah membuat kelompok usaha bersama sesuai dengan minat para PPKS untuk mem-

fasilitasi kebutuhannya. “Tiap tahun kita evaluasi. Apakah ada perkembangan tidak? Kalau perlu modal lagi, kita bantu,” katanya.

Data Belum Mutakhir

Berbeda dengan itu, Siska justru melihat masih banyak persoalan PPKS yang belum ditangani oleh Dinsos. Hal ini ia dapatkan dari berbagai keluhan masyarakat langsung. Menurutnya, tak sedikit ia menerima pengaduan misalnya, bayi terlantar yang datang langsung ke komisi IV.

Tak hanya itu, ia juga sering menerima maupun berkunjung langsung kepada penyandang disabilitas yang mengeluh berbagai permasalahan.

“Ada penyandang disabilitas



Shinta Dewi

yang tidak mempunyai BPJS, bahkan KTP saja tidak punya. Dan ini masih banyak. Akhirnya kita antar yang tidak punya KTP agar dibuatkan. Bahkan kita juga dorong Disdukcapilnya suruh datang,” katanya.

Siska berpendapat, hal ini disebabkan Dinsos Kabupaten Cirebon belum memiliki data mutakhir PPKS. Padahal, kata Siska, data itu menjadi penting untuk diperbaharui, agar implementasi program Dinsos juga tepat sasaran.

Siska bilang, dalam melakukan pemutakhiran data PPKS, Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) merupakan *leading sector* untuk mendata PPKS yang berada di desa. “Apalagi pengesahan Perda sekarang ini, ada klausul baru yang mengatur pemerintah desa untuk mengawal data yang lebih terarah dan sistematis,” papar Politisi Golkar ini.

Namun, dengan tugas yang begitu berat, tak sebanding dengan upahnya yang masih minim. Ia bilang, seharusnya perlu perhatian lebih untuk Puskesos. Menurutnya, Komisi IV melalui Pansus kemarin juga mengusulkan ada tambahan jumlah Puskesos. Baik itu kegiatan, maupun berbentuk perhatian.

“Selama ini kan hanya Rp 300 ribu. Kita berharap dengan diperhatikan lebih, maka penyelesaian data itu juga bisa benar dan valid. Jadi gak kaya kemarin lagi,” ujarnya.

Menanggapi itu, Shinta mengaku Dinsos Kabupaten Cirebon telah melakukan pendataan langsung ke desa dan berdialog dengan kuwu.

“Kita cek ke lapangan langsung setelah berdialog dengan kuwu, kemudian kita buat berita acara ketika ada perubahan data PPKS. Biar data itu gak berbenturan dengan data lainnya. Kita gak mau ngajuin data berulang-ulang,” katanya.

Namun, ia juga mengakui bahwa selama ini data yang Dinsos peroleh, merupakan data lama sejak tahun 2017. Sehingga belum semua penyandang PPKS terakomodir. Selain itu, data yang ada saat ini juga belum secara spesifik memisahkan sesuai 26 kriteria.

“Belum ada pendataan ulang. Rencananya tahun depan kita akan mendata lagi menunggu keputusan menteri yang nantinya akan berbasis aplikasi,” jelasnya.

Siska berharap, pendataan yang benar segera dilakukan. Setelah itu dinas untuk bersama-sama menangani PPKS. Ia berharap Perda ini tidak hanya ‘ketok palu’ selesai. Namun harus direalisasikan.

“Baik Dinas DPPPKB, Dinsos harus bergerak bersama mengentaskan PPKS. Karena kalau Dinsos sendiri akan kelabakan tentunya. Data itu harus tercantum dalam Sistem Layanan Terpadu (SLRT) satu pintu. Permasalahan ada anak yang terlantar, orangtua yang terlantar belum bisa diatasi, itu akan menjadi menghambat potensi daerah untuk maju dan berkembang,” katanya.

Dinsos Kabupaten Cirebon telah merencanakan 4 program yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-038 Tahun 2020 diantaranya: Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Penangan warga Negara Migran tindak kekerasan, Program Penanganan Bencana Alam.

Shinta mengaku, 4 Program ini telah masuk Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon.

“Kami juga mengapresiasi dengan telah disahkannya Perda PPKS. Dengan adanya payung hukum itu, kita akan lebih tertib untuk implementasinya. Intinya tinggal nunggu Perbup yang nantinya akan menghasilkan Juknis-juknis,” katanya.

Siska berharap, agar Perbupnya secepatnya dikeluarkan untuk pelaksanaan di Lapangan.

“Jangan sampai seperti Perda yang pernah ada, dimana Perbupnya sampai bertahun-tahun. Untuk PPKS ini maksimal 1 tahun setelah Perda ini telah disahkan,” tegasnya. •suf

Kriteria PPKS

- a. Anak balita terlantar;
- b. Anak terlantar;
- c. Anak berhadapan dengan hukum;
- d. Anak jalanan;
- e. Anak dengan disabilitas;
- f. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
- g. Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- h. Lanjut usia terlantar;
- i. Penyandang disabilitas;
- j. Tuna susila;
- k. Gelandangan;
- l. Pengemis;
- m. Pemulung;
- n. Kelompok minoritas;
- o. Bekas warga binaan lembaga permasyarakatan;
- p. Orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS)*;
- q. Korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- r. Korban tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*);
- s. Korban tindak kekerasan;
- t. Pekerja migran bermasalah sosial;
- u. Korban bencana alam;
- v. Korban bencana sosial;
- w. Perempuan rawan sosial ekonomi;
- x. Fakir miskin;
- y. Keluarga bermasalah sosial psikologis; dan
- z. Komunitas adat terpencil.

(Pasal 5 ayat 2)

Ruang Lingkup PPKS

- a. Perencanaan dan alokasi anggaran;
- b. Tahapan proses pelayanan kesejahteraan sosial;
- c. Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. Penanganan fakir miskin;
- f. Peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- g. Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial;
- h. Pendaftaran dan rekomendasi;
- i. Standar pelayanan minimal;
- j. Koordinasi;
- k. Kerjasama dan kemitraan;
- l. Sistem informasi data PPKS;
- m. Keterlibatan sosial; dan
- n. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

(Pasal 6 ayat 1)

Intisari Perda PPKS

DPRD Kabupaten Cirebon telah mengesahkan Peraturan Daerah untuk penangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), agar pemberdayaannya bisa tepat sasaran. Berikut ringkasan Perda PPKS yang telah Cirebon Katon rangkum.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon

- a. Penetapan kebijakan bidang PPKS, dengan mengacu pada kebijakan nasional;
- b. Penyusunan perencanaan dan kerjasama bidang PPKS;
- c. Pelaksanaan koordinasi pemerintahan di bidang PPKS;
- d. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi bidang PPKS;
- e. Pengidentifikasian sasaran PPKS;
- f. Penggalan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- g. Pengembangan dan pemberdayaan penggunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- h. Pelaksanaan program di bidang PPKS dan/ atau kerjasama antar Kabupaten/Kota;
- i. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan kebijakan di bidang PPKS;
- j. Pelaporan pelaksanaan bidang PPKS;
- k. penyediaan sarana dan prasarana bidang PPKS;
- l. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial;
- m. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial;
- n. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- o. Pemberian rekomendasi izin lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial;
- p. Pendaftaran lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial;
- q. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan PPKS; dan
- r. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar, yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.

(Pasal 7)

Tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten

- a. Penyusunan pedoman teknis dan operasional penyelenggaraan PPKS;
- b. Penyusunan perencanaan terpadu antar pemangku kepentingan dan pengalokasian anggaran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari sumber lainnya;
- c. Mendorong peran masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan taraf hidup PPKS;
- d. Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
- e. Pemberian bantuan sebagai stimulan kepada masyarakat; dan
- f. Pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan PPKS kepada Gubernur.

(Pasal 8 ayat 4)

PENANGANAN PPKS

- (1) Penyelenggaraan penanganan PPKS dilakukan melalui usaha-usaha kesejahteraan sosial, kewirausahaan sosial dan termasuk pengembangan potensi sistem sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Penanganan PPKS di Daerah wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten secara lintas sektoral bersama-sama dengan masyarakat melalui program-program penanganan masalah sosial dengan pendekatan yang menyeluruh.
- (3) Penanganan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Komite Penanganan PPKS.
- (4) Usaha penanganan masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Preventif;
 - b. Kuratif; dan/atau
 - c. Rehabilitatif.

(Pasal 10)

Program Pendataan

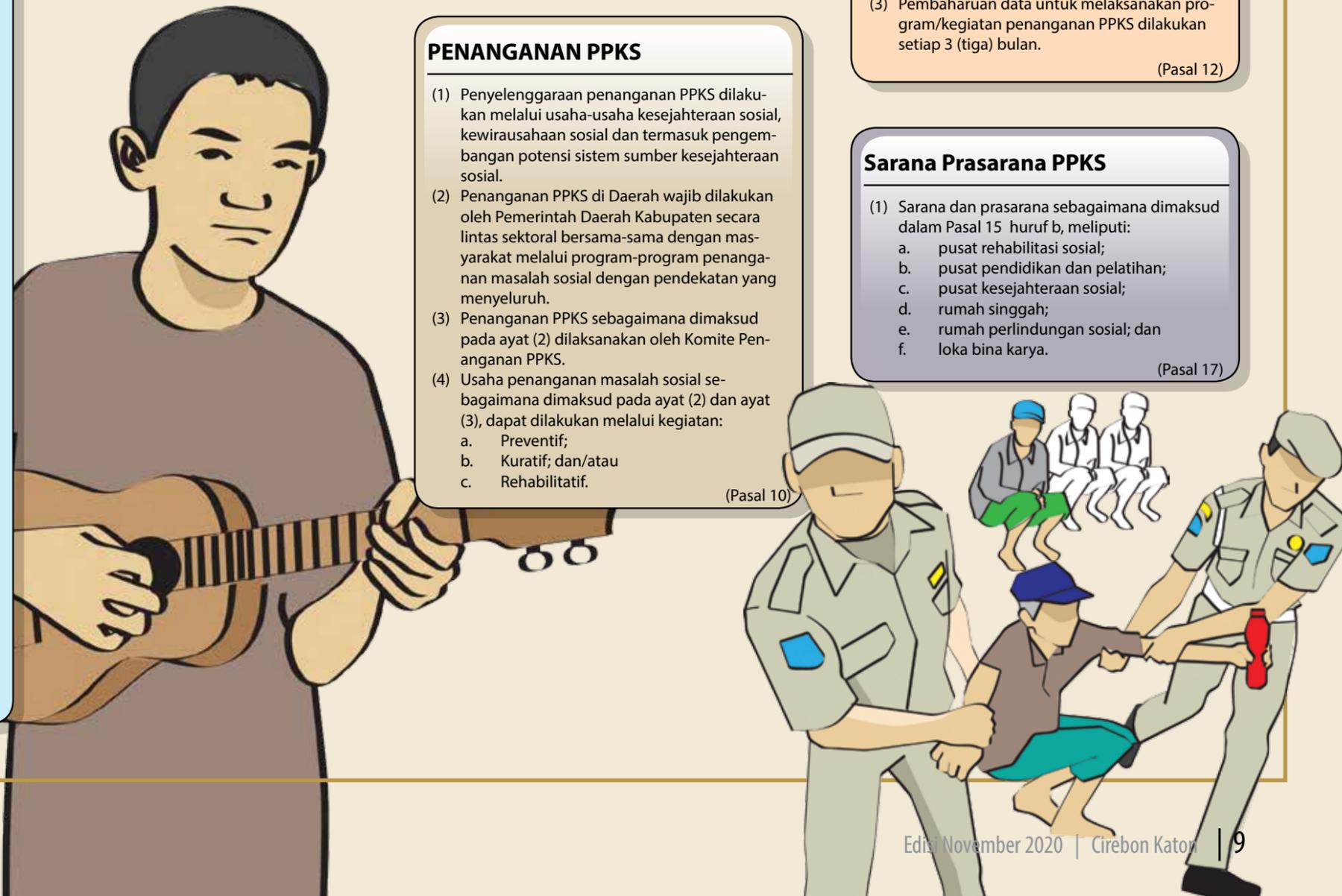
- (1) Program/kegiatan penyelenggaraan PPKS yang dilaksanakan Dinas disusun berdasarkan basis data PPKS.
- (2) Data PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
 - a. Pemerintah Desa/Kelurahan (puskesmas), dengan mengetahui Camat, berupa data masyarakat miskin; dan
 - b. berupa data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (4) Ketentuan tentang pendataan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Program/kegiatan Penyelenggaraan PPKS yang dilaksanakan Dinas diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup para pemeroleh pelayanan kesejahteraan sosial, kemandirian masyarakat, membantu meringankan beban masyarakat.
- (3) Pembaharuan data untuk melaksanakan program/kegiatan penanganan PPKS dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.

(Pasal 12)

Sarana Prasarana PPKS

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
 - a. pusat rehabilitasi sosial;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - c. pusat kesejahteraan sosial;
 - d. rumah singgah;
 - e. rumah perlindungan sosial; dan
 - f. loka bina karya.

(Pasal 17)



Perlu Program Konkret untuk PPKS

Persoalan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Cirebon tampaknya belum diberdayakan secara maksimal. Padahal imbasnya akan menghambat potensi maupun kemajuan daerah.



Foto: foto dok. Syaeful Badar

Untuk mengetahui pandangan akademisi melihat persoalan PPKS dan Perda. Reporter Cirebon Katon, mewawancarai Penggagas Warga Siaga dan Konsultan Nasional Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Dosen IAIN Syech Nurjati Cirebon Syaeful Badar MSi. Berikut petikannya :

Bagaimana menurut kaca mata Anda, mengenai PPKS yang ada di Kabupaten Cirebon?

Mengenai PPKS yang saya tahu di Kabupaten Cirebon, hampir semua klasifikasi ada di

Kecamatan Palimanan. Pertama di situ berdiri Balai Pemulihan Sosial Wanita (BPSW). Sebuah panti rehabilitasi untuk wanita malam, hasil razia di daerah rawan prostitusi seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Kemudian di ujungnya lagi ada Panti untuk anak jalanan, anak terlantar. Saya pernah mendampingi mahasiswa PPL di situ. Panti tersebut milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat bukan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon. Sehingga koordinasinya masih belum bisa dimaksimalkan, karena memang penyan-

dang yang ada di asrama itu lingkungannya luas se-Jawa Barat.

Idealnya tiap kabupaten dan kota itu memiliki pola pembinaan yang seperti itu, melalui dinas sosial secara efektif misalkan. Dinsos harus melihat secara detail, kemudian ada evaluasi yang dilakukan.

Sebenarnya Kabupaten Cirebon ini sudah ada rumah singgah di Mundu untuk orang-orang yang ketergantungan obat-obatan. Di sana juga cukup bagus, tapi memang efektivitas untuk rumah singgah itu kalau bisa harus mengambil dua

wilayah barat dan timur.

Sehingga, saya kira pemetaan itu penting agar bisa memberikan ruang-ruang peningkatan dan pembinaan, kabupaten Cirebon itu kan ada wilayah barat dengan wilayah timur.

Kemudian soal rumah singgah, seharusnya juga menjadi rumah pemberdayaan bukan hanya persinggahan. Selama ini, rumah singgah hanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu, sedangkan untuk pemberdayaan ini kurang, makanya harus ada rumah pemberdayaan.

Anda pernah melakukan pendampingan salah satu kriteria PPKS? Melalui apa dan perannya bagaimana?

Warga siaga adalah pelopor desa siaga aktif, jadi isunya adalah tentang kesehatan ibu hamil. Bagaimana, agar ibu hamil sehat, bayinya lahir juga sehat dan keluarganya bahagia. Nah melalui itu kemudian kita melangkah pada kesehatan reproduksi.

Saat melakukan pendampingan kesehatan reproduksi, kita melakukan pendampingan PPKS juga, seperti kelompok waria, kelompok pekerja seks. Kita melakukan pendampingan kepada mereka agar tidak tertular HIV/AIDS. Nah kemudian memberdayakan mereka untuk hidup sehat, hidup bersih dan agar bisa hidup secara mandiri.

Kemudian untuk anak jalanan, kita melakukan pendampingan penguatan mental, agar mereka merasa yakin bahwa sebenarnya mampu untuk melakukan sesuatu yang lebih baik.

Baik Pak, sebenarnya apa yang menjadi faktor orang menjadi PPKS?



Syaeful Badar

Ini yang menarik, karena saya hampir 15 tahun mendampingi mereka. Pertama, memang persoalan ekonomi, dan kesempatan memperoleh pekerjaan. Tetapi ada juga karena persoalan mental.

Persoalan mental ini akibat merasa nyaman memposisikan diri seperti itu, karena dengan begitu bisa bertahan hidup. Sehingga upaya pembinaannya juga tidak sama. Perasaan bermoral miskin itu tidak hanya terjadi pada orang miskin saja. Tetapi juga bisa dirasakan oleh yang kaya.

Ketika kaya tapi mentalnya miskin akhirnya dia melakukan korupsi. Dalam PPKS juga ada

kelompok yang memang mereka sudah merasa nyaman pada posisi seperti itu.

Dari pengalaman itu, apa yang mesti dilakukan untuk eksklusif?

Kalau saya berharap, dinas itu harus terjun langsung, karena terkadang ketika kami memerlukan data jumlah PPKS datanya jauh dari realita yang kami temukan langsung di lapangan. Ketika kita cek dengan data Lembaga Warga Siaga, biasanya sangat berbeda.

Jadi adanya Perda itu, kemudian harus ada tindak lanjut dengan pemetaan potensi PPKS terlebih dahulu. Sehingga pem-



berdayaan akan lebih efektif, dan tepat sasaran. Saya pernah beberapa kali koordinasi dengan dinas sosial. Memang sudah ada program-program yang dilakukan semisal, pelatihan menjahit.

Sedangkan untuk anak jalanan dan mantan para pecandu itu biasanya hanya diberi fasilitas usaha cuci motor. Ada juga pelatihan elektronik, pelatihan sablon tapi program yang ada itu tidak berdasarkan dari hasil survey, hasil pemetaan, atau hasil pendataan potensi.

Pelatihan itu hampir rutin, tapi kemudian bagaimana setelah itu mereka didampingi ketika sampai ke desanya. Itu persoalan yang tidak pernah dilakukan, belum lagi tidak ada pengawasan pengaplikasiannya pasca pelatihan.

Ketika diturunkan ke masyarakat ini belum pernah ada pendampingan. Berbeda dengan 2 panti yang ada di Palimanan, secara pendampingan efektif hanya cakupannya saja yang terlalu luas.

Selain itu, legislatif juga harus mengalokasikan anggaran yang dikeluarkan untuk PPKS

agar benar-benar tepat sasaran. Artinya ketika ada Perda itu kan pasti ada anggaran yang digunakan, makanya dengan adanya Perda ini saya berharap banyak muncul lembaga-lembaga yang mendampingi.

Lembaga-lembaga yang mendampingi itu kemudian direspon dengan dinas tertentu agar berjalan bersama. Nah kalau hal itu sudah berjalan, maka legislatif selaku pengambil kebijakan anggaran akan mampu melakukan upaya agar anggaran ini sampai pada persoalan yang konkret.

Jadi tidak hanya sekedar rutinitas ya, tetapi ada semacam evaluasi, dan saya yakin di kabupaten Cirebon ini banyak lembaga yang sebenarnya sudah bergerak, nah tinggal bagaimana mobilitas ini. Maka kemudian perlu sinergitas lembaga sosial ini yang dikoordinir oleh dinas tertentu.

Ada Mawar Balqis, apalagi lembaga-lembaga yang konsen pendampingan-pendampingan. Nah itu kan harusnya menjadi satu *channel*. Jadi legislatif saya kira harus konsisten memberikan anggaran tapi kemudian

juga harus bertanggungjawab mengevaluasi dari anggaran yang dikeluarkan ke dinas maupun dengan lembaga-lembaga yang lain.

Nah, lalu kalau untuk legislatif bagaimana?

Saya kira dengan DPRD telah membuat Perda ini bagi saya sebuah kemajuan. Karena adanya tingkat kepedulian yang lebih tersistem. Karena kalau tingkat kepedulian tidak tersistem akan berjalan tidak efektif.

Saya ambil contoh sekarang lagi musim gerakan Jumat berkah. Tiap Jumat orang keliling memberikan makanan gratis bagi orang yang ada di jalan. Dalam seminggu dia mengambil hanya satu momen, sekarang yang 6 harinya kenapa gak dipikirkan juga, jadi jangan sampai sedekah itu hanya kumpul di hari Jumat. Orang bersedekah di hari Jumat semua, sementara hari lainnya kelaparan.

Nah saya berharap akan ada upaya bagaimana Perda ini kemudian mampu mengayomi, mendampingi PPKS yang notabene adalah bagian dari keluarga kita. Jadi kalau ada razia anak jalanan itu, tidak hanya sekedar dirazia, dikumpulkan, didata, kemudian udah dilepas.

Melalui Perda ini maka kemudian Dinsos perlu melakukan koordinasi. Mereka yang dirazia harus diketahui asal desanya. Kemudian dipanggil kepala desa itu, sehingga persoalannya akan kelihatan. Saya berharap Perda yang dicetuskan dan sudah disahkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon bisa terorganisir, baik dinas dengan camat atau desa ini mampu berkoordinasi membangun sinergitas untuk pemberdayaan PPKS. •suf

#	Unit	Nomor Telepon
1	Polresta Kab. Cirebon	0231-204466
2	Polres Cirebon Kota	0231-205179
3	Pemadam Kebakaran Kab. Cirebon	0231-638249
4	Pemadam Kebakaran Kota	0231-484113
5	Ambulance	0231-206330 ext.1042
6	Pos SAR Cirebon	0231-8356347
7	Unit Transfusi Darah PMI Kota	0231-204964
8	Unit Donor Darah PMI Kota	0231-201003
9	Pengaduan PLN Kota Cirebon	0231-236551
10	Pengaduan Gangguan PDAM	0231-244222
11	PDAM Tirtajati (Sumber)	0231-321457
12	PDAM Kota Cirebon	0231-204800
13	Pengaduan Gas Kota Cirebon	0231-203323
14	Terminal Bis Harjamukti	0231-248902
15	Stasiun Kejaksan	0231-210444
16	Stasiun Parujakan	0231-202577
17	RSUD Arjawinangun	0231-358335 / 359090
18	RSUD Gunung Jati	0231-206-330
19	RSUD Waled	0231-661126; IGD: 0231-661275
20	RSIA Sumber Kasih	0231-203815
21	RS Ciremai	0231-238335
22	RS Hasna Medika	0231-343405; IGD: 0231-8825010
23	RS Mitra Plumbon	0231-323100
24	RS Pelabuhan	0231-230024 / 205657
25	RS Permata	0231-8338877 / 8338899; IGD 0231-8338881
26	RS Pertamina Klayan	0231-224797 / 224798; IGD: 08112433338
27	RS Putra Bahagia	0231-485654
28	RS Sumber Urip	0231-8302689
29	RS Sumber Waras	0231-341079

Mengkaji Inovasi Layanan Disdukcapil

Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon mengunjungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tegal, mengenai inovasi pelayanan publik.



Foto-foto : dok sethwan

Penyuluhan PKL Dinas Koperasi & UKM

Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon berkunjung ke Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Cirebon.



Foto-foto : dok sethwan

Rencana Kerjasama Pengelolaan Sampah

Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan.



Foto-foto : dok sethwan

PT Rajawali Kurang Bahan Baku

Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon mengunjungi PT Rajawali II mengenai kekurangan bahan baku tebu di masa pandemi.



Foto-foto : dok sethwan

Jalan di Bawah Rel Astanajapura-Lemah Abang Rusak dan Langganan Banjir



Foto: foto lhasan/ck

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Saya Rully (25) warga desa Lewi Dinding, Kecamatan Lemah Abang. Saya bekerja sebagai buruh di salah satu pabrik di Kota Cirebon.

Selain hari Minggu, saya berangkat bekerja setiap pagi. Setiap menuju lokasi kerja, saya selalu menghadapi kemacetan. Terutama di Jalan Lemah Abang, tepatnya di jalan bawah trowongan Rel Kerata Api perbatasan antara Kecamatan

Lemah Abang dan Astanajapura.

Memang, setiap harinya kondisi jalan tersebut seringkali mengalami kemacetan. Pasalnya, jalan utama perbatasan antar kecamatan itu banyak yang berlubang disertai tikungan tajam. Apalagi ketika cuaca sedang hujan. Jalan tersebut seringkali mengalami kemacetan yang panjang karena banjir.

Karenanya, saya memohon kepada dinas terkait untuk segera

memperbaiki. juga kepada kepada bapak dan ibu dewan untuk segera menindaklanjuti.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Rully (25) - Buruh - Lemahabang

Jawab

Terima kasih Rully atas informasinya. keluhan anda akan kami teruskan kepada instansi terkait.

Limbah Cangkang Berserakan

Salam Hormat,

Bapak dan Ibu anggota DPRD Kab.Cirebon yang saya hormati.

Saya Pudin (23) warga Desa Playangan. Desa kami mempunyai banyak pengusaha cangkang kerang, bahkan sudah mensuplay

beberapa daerah, seperti Indramayu, Jakarta dan Bandung. Bahkan sampai Luar Jawa. Dari aktifitas usaha tersebut menghasilkan limbah yang berserakan di sungai, jalan, dan sawah. Kami berharap Bapak dan Ibu dewan

bisa mengkoordinasikan kepada pengusaha dan pemerintah desa setempat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih.

Pudin (23) -Wiraswasta - Playangan

Jawab

Terima kasih Pudin atas informasi dan kepeduliannya terhadap lingkungan. Teruslah menjadi contoh bagi yang lain. Usulan anda akan kami teruskan pada instansi yang dimaksud.



Banpres UMKM Tidak Tepat Sasaran



Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Saya Ayu, seorang ibu rumah tangga dan juga pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu dewan terkait penerima bantuan tunai langsung BANPRES UMKM dari pemerintah. Sebelumnya, beberapa UMKM yang mengeluhkan pencairan bantuan dana tersebut tidak tepat sasaran. Ada beberapa orang yang

mendapat dana tersebut padahal tidak memiliki usaha. Sebaliknya, yang jelas memiliki usaha namun tidak dapat. Apakah pemerintah mencairkan dana bantuan sudah dengan memperhatikan legalitas UMKM? Mohon Bapak dan Ibu dewan dapat menyalurkan aspirasi saya kepada pemerintah. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ayu (35) - Pedagang - Buntet

Jawab

Terima kasih Ayu atas sikap kritisnya. Saat ini proses bantuan untuk UMKM masih berlangsung. Penentuan penerima dan pengaturannya berada di pemerintah pusat. Terkait legalitas usaha memang harus dimiliki oleh setiap pengusaha, baik skala kecil maupun besar. Silahkan bisa menghubungi instansi terkait dalam mengurus perizinannya.

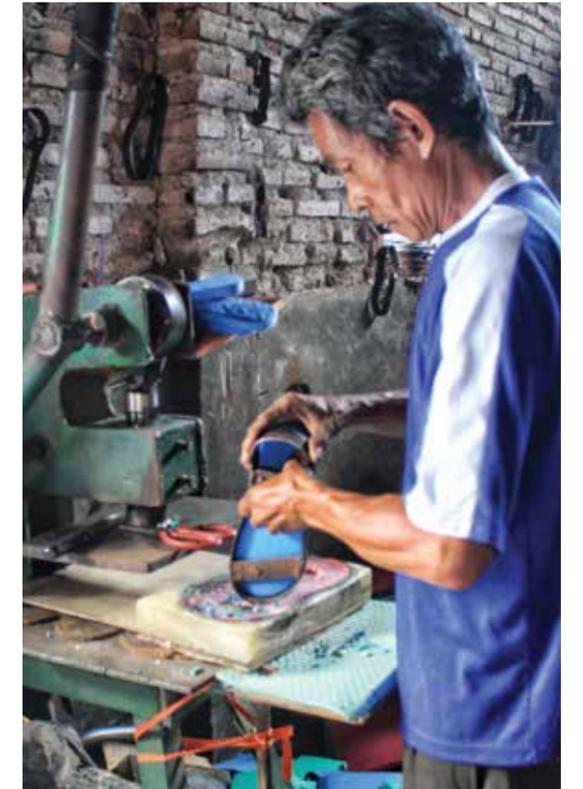


Sendal kebarepan Pernah Berjaya, Kini Tinggal Dua

Medio 90-an, sandal kebarepan berjaya. Hampir setiap rumah di Desa Kebarepan adalah pengrajin sandal berbahan spon. Kini hanya tinggal dua pengrajin. Tentu saja mekanisme pasar yang membuatnya berguguran.

Satu pengrajin kini mampu melayani pesanan sebanyak 2.400 hingga 3.000 pasang per hari. "Masih cukup bagus sih, sekarang bahkan lebih banyak kirim ke Kalimantan," ujar Sumarni (62 tahun) yang sudah 30 tahun bergelut dengan pembuatan sandal.

Tampaknya, mereka butuh sentuhan inovasi produksi, serta akses pemasaran agar kembali berjaya. "Bahan baku juga sekarang susah," tambahnya. •vik



-foto-foto alfanidk

Pembangunan GOR Wanasaba Kidul Masih Belum Rampung

Hasil pemeriksaan Inspektorat pada Desa Wanasaba Kidul ditemukan ketidaksesuaian nilai fisik. Salah satunya pembangunan GOR yang belum rampung.



Foto: foto . dok . setawan

Sudah sekira empat tahun pembangunan GOR Wanasaba Kidul berjalan. Namun hingga kini pembangunan belum rampung. Beberapa warga pun mengeluhkan hal ini kepada DPRD Kabupaten Cirebon.

Padahal, warga bilang, anggaran untuk pembangunan gedung serbaguna itu sudah

terserap 100 persen. Mereka berharap, agar pembangunan tersebut cepat diselesaikan.

Atas laporan itu, DPRD Kabupaten Cirebon bergerak cepat mengunjungi Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Mereka meminta penjelasan pembangunan GOR yang masih belum rampung itu.

Mereka bilang, masalahnya pembangunan tersebut dibangun melalui Anggaran Dana Desa (ADD) secara bertahap. Dari tahun anggaran 2017, 2018, hingga 2019. Pada tiap tahunnya, dianggarkan kurang lebih sebesar Rp 300 juta, dengan nilai total anggaran, hingga kini lebih kurang sebesar Rp 1 miliar.



Kuwu Wanasaba Kidul Turmudi, membenarkan terkait anggaran yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan GOR yang belum selesai. Ia mengaku, bahwa pembangunan yang ada di Desa Wanasaba Kidul dilakukan oleh pihak ketiga. Termasuk pembangunan GOR.

“Untuk kedepannya, kami akan memperbaiki kembali terutama dalam hal pembangunan yang ada didesa,” katanya.

Sementara itu, perwakilan dari Inspektorat Kabupaten Cirebon menyampaikan, untuk pemeriksaan pada Desa Wanasaba Kidul telah ditemukan nilai fisik sebesar Rp 16 juta dari dua kegiatan yang ada. Dan untuk pembangunan GOR masuk dalam pemeriksaan khusus.

“Dalam situasi Pandemi Covid-19 ini, pemeriksaan oleh Inspektorat hanya pada 3 pos pemeriksaan saja. yaitu pemeriksaan pembangunan, pajak dan administrasi,” ujarnya.

Melihat permasalahan tersebut, anggota Komisi

I DPRD Kabupaten Cirebon H Junaedi, ST menegaskan, didalam melakukan pengelolaan keuangan, desa haruslah berpedoman pada 3 aspek. Aspek pertama adalah Transparansi.

“Artinya, setiap program dan kegiatan di desa haruslah diketahui oleh masyarakat banyak,” jelasnya.

Kedua, aspek akuntabel, setiap rupiah yang dipakai haruslah bisa dipertanggungjawabkan. Ketiga, aspiratif atau memperhatikan usulan partisipasi warga untuk melaksanakan program dan kegiatan di desa.

“Untuk Desa Wanasaba Kidul bisa disimpulkan, pada asas akuntabel masih ditemui masalah, pada asas transparansi dianggap masih kurangnya peran pengawasan dari BPD,” ungkapnya. Junaedi berharap, kepada Inspektorat dan DPMD untuk terus menerus melakukan pendampingan kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Cirebon. Khususnya Desa Wanasaba Kidul. “Semoga permasalahan yang terjadi bisa segera terselesaikan,” harapnya. •Abdul

Komisi II Pertimbangkan Penggunaan Cantrang

Mayoritas nelayan tangkap di Kota Tegal menggunakan alat cantrang untuk menangkap ikan. Dalam 2 bulan saja, omsetnya bernilai milyaran. Bagaimana untuk nelayan di Kabupaten Cirebon



Foto-foto: doksetman

Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Tegal. Kunker yang dijadwal Badan Muswarah (Bamus) ini secara khusus membahas pengelolaan sumber daya perikanan.

Dalam kunker tersebut, dipimpin Subhan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon. Subhan mengapresiasi kinerja DPRD Kota Tegal. Apresiasi diberikan terkait penyusunan anggaran untuk kegiatan

nelayan pada masa paceklik.

Menjawab itu, anggota Komisi II DPRD Kota Tegal Eko Susanto, mengucapkan terimakasih atas apresiasi dan kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon di kota Tegal. Eko mengatakan, kota Tegal adalah kota yang kecil. Bahkan, ia bilang, untuk mengelilingi semua wilayah di Kota Tegal, hanya menghabiskan waktu satu jam menggunakan sepeda motor. Berbeda dengan jumlah penduduk kota Tegal yang cukup padat dengan

mayoritas nelayan perikanan.

"Dengan jumlah penduduk 280 ribu lebih. Kota Tegal memiliki sumber daya perikanan yang melimpah," katanya.

Eko menjelaskan, di Kota Tegal terdapat dua jenis bidang perikanan. Pertama perikanan budidaya, dan kedua perikanan tangkap. Namun, mayoritas masyarakat lebih berminat terhadap perikanan tangkap.

"Kalau perikanan budidaya itu kurang diminati, bahkan banyak tambak yang mangkrak tidak



diurus. Masyarakat lebih memilih melaut karena tambak kurang produktif," ungkapnya. Menurutnya, para nelayan di Kota Tegal pada umumnya hanya menggunakan empat macam alat penangkapan ikan. Keempat tersebut yaitu pursin, jinet (jaring), cantrang, dan bedo (payang).

"Hampir 80 persen nelayan Kota Tegal menggunakan alat tangkap cantrang. Walaupun secara nasional belum dilegalkan, namun ada diskresi dari Presiden boleh menggunakan cantrang," jelasnya.

Eko mengatakan, hingga saat ini nelayan cantrang di Kota

Tegal, masih melaut dengan berlandaskan kebijakan diskresi menggunakan surat keterangan melaut (SKM).

Menurutnya, keberadaan cantrang lebih disukai oleh nelayan, karena lebih efisien dan menguntungkan. Setidaknya ada tiga alasan mengapa mereka lebih memilih menggunakan cantrang.

Pertama, harga cantrang lebih murah dibanding alat tangkap ikan lainnya. Kedua, *Fishing day* atau waktu melaut dengan cantrang lebih singkat. Ketiga, hasil tangkapannya juga mudah terserap di pasar.

"Penghasilan melaut menggunakan cantrang selama 2 bulan kurang lebih 60 hingga 70 hari, bisa mendapatkan hingga Rp1 miliar lebih, karena bukan cuman ikan yang didapat namun juga cumi. Cumi itu kemudian ditampung oleh pengusaha investasi yang membelinya dengan harga dolar," paparnya.

Menanggapi itu, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon R Cakra Suseno mengatakan, saat ini Kabupaten Cirebon masih terjadi polemik mengenai penggunaan alat tangkap ikan berupa arad.

Mulai Tahun 2016, arad dianggap tidak ramah lingkungan dan dilarang penggunaannya. Sementara para nelayan menilai penggunaan arad lebih mampu menguntungkan daripada alat lainnya, karena lebih cocok dengan kontur perairan Cirebon yang cenderung dangkal.

"Tapi saat rapat, Nelayan Cirebon menyatakan bahwa mereka terinspirasi dari nelayan Tegal yang kembali boleh menggunakan cantrang. Ini mungkin dapat juga diterapkan di Kabupaten Cirebon," pungkasnya • **Abdul**

Jembatan Babakan-Karangsembung Memprihatikan

Kondisi jembatan penghubung antara kecamatan Babakan dengan kecamatan Karangsembung, sangat memprihatinkan. Namun Dinas PUPR bilang belum ada alokasi dana untuk perbaikan.



Foto: foto : dok.sekwan

Seiring banyaknya keluhan dan laporan masyarakat terkait jembatan rusak di Kecamatan Babakan, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon didampingi Dinas PUPR dan Kuwu Desa Gembongan Mekar meninjau secara langsung kondisi infrastruktur yang ada disana.

Saat meninjau, terlihat jembatan yang kondisinya sangat

memprihatinkan. Jembatan tersebut, merupakan jembatan penghubung antara Kecamatan Babakan dengan Kecamatan Karangsembung.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Hermanto, mengatakan pada beberapa titik jembatan terlihat mengalami keretakan. Berbeda jika dilihat dari atas jembatan, yang tampak

masih bagus dan kuat, namun bagian bawahnya telah rusak dan keropos. Sehingga cukup membahayakan karena rawan ambruk.

Sementara itu, Kuwu Desa Gembongan Mekar Kamaludin menjelaskan, bahwa jembatan penghubung itu sudah dibangun sejak puluhan tahun lalu, dan saat ini perlu segera diperbai-

ki. Pasalnya, banyak warga dan pengguna jembatan di atas sungai Ciberes itu merasa khawatir saat melintas karena kondisinya yang memprihatinkan.

“Apalagi jika air sungai itu sedang deras, tentu sangat riskan,” jelasnya.

Menurutnya, ada dua titik jembatan yang perlu segera diperbaiki, agar warga pengguna jalan dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Ia juga mengatakan, bahwa jembatan penghubung antar kecamatan itu, merupakan urat nadi perekonomian masyarakat.

Ia pun meminta, agar perbaikan jembatan di Desa Gembongan Mekar itu dapat segera terwujud dengan memperlebar sekitar 5 meter dan memperpanjang 12 meter.

Menanggapi itu, Hermanto meminta Dinas PUPR Kabupaten Cirebon agar segera melakukan perbaikan untuk jembatan itu. Ia juga mendesak Dinas PUPR agar perbaikan infrastruktur harus menjadi skala prioritas pembangunan.

Karena, lanjut Hermanto, infrastruktur merupakan akses vital bagi masyarakat setempat. Baik untuk roda perekonomian maupun pertanian. Selain itu, kondisi infrastruktur yang baik akan meningkatkan kecepatan mobilitas warga.

Menanggapi itu, Kabid Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Tomy Hendrawan, menyatakan, bahwa sebagian besar anggaran dana desa pengalokasiannya telah dialihkan untuk penanganan wabah Covid-19. Sehingga untuk perbaikan infrastruktur hanya akan dilakukan pada tahun depan.

“Jika di tahun 2021 situasi dan kondisi normal kembali, kami akan memprioritaskan per-



baikan infrastruktur, salahsatunya jembatan penghubung warga ini,” katanya.

Selain itu, Tomi berjanji, akan meningkatkan infrastruktur di desa-desa lain untuk sarana dalam mendukung kemajuan, peningkatan ekonomi maupun memudahkan administrasi pemerintah desa, Musyawarah

Pimpinan Kecamatan (Muspi-ka) dan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida).

“Jembatan penghubung antar kecamatan itu, harus secepatnya dilakukan rehab total demi keselamatan dan transportasi masyarakat dan infrastruktur ekonomi, niaga, dan bisnis,” tegas Hermanto. •Sar

Komisi IV Kunjungi Layanan Terpadu Satu Atap PPPMI

Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Indramayu mempermudah pengurusan dokumen para pekerja yang akan berkerja di luar negeri. Bagaimana dengan Kabupaten Cirebon?



Foto: foto : dok. sethwan

Dalam rangka mengetahui perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di masa pandemi Covid-19, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon melaksanakan rapat kunjungan kerja ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indramayu.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Hj Ismiyatul mengatakan, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon sebelum-

nya mendapat informasi layanan satu atap dalam mengurus pekerja migran di Kabupaten Indramayu. Ia menanyakan pelayanan seperti apa yang ada di Kabupaten Indramayu bagi para pekerja migran.

Menanggapi pertanyaan itu, Kepala Disnaker Kabupaten Indramayu Hj Sri Wulaningsih menyampaikan bahwa keberadaan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Per-

indungan Pekerja Migran Indonesia (LTSA PPPMI) Kabupaten Indramayu sangat membantu. Peralnya, lanjut Sri, LTSA PPPMI menjadi tumpuan untuk proses pengurusan dokumen para pekerja migran yang akan bekerja di luar negeri, karena semua persyaratan dilayani satu atap.

“Dengan adanya pelayanan satu atap di Indramayu, masyarakat tidak merasa kesulitan untuk mengurus kelengkapan

dokumen sebagai persyaratan calon PMI ke luar negeri,” ujarnya.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon H Mahmudi juga mengatakan, keberadaan LTSA PPPMI Kabupaten Indramayu saat ini sudah sangat membantu bagi para calon tenaga migran. Namun ia juga menanyakan, nasib tenaga migran di tengah pandemi yang saat ini masih berada di negara lain.

Mengenai itu, Sri menyampaikan, LTSA PPPMI telah menggelar rapat evaluasi yang dihadiri oleh Disnaker Kabupaten Cirebon, Disdukcapil Kabupaten Cirebon, Polres Indramayu, Imigrasi Cirebon, RSUD Indramayu, UPT BP2MI Wilayah Jawa Barat, BJB Cabang Indramayu serta BP Jamsostek KCP Indramayu.

Dari rapat evaluasi tersebut, telah diputuskan bahwa pekerja migran yang saat ini masih berada di luar negeri di tempatnya bekerja dan belum bisa kembali ke Indonesia, tetap mendapatkan perlindungan Jamsostek selama sesuai dengan tenggat waktu bekerjanya.

Dalam kunjungan itu, Sri juga menyampaikan, bahwa minat warga Indramayu untuk bekerja ke luar negeri sangatlah besar. Menurutnya, ada tiga faktor yang mendorong minat warga Indramayu untuk bekerja ke luar negeri itu tinggi. Pertama, dorongan kebutuhan hidup untuk memenuhi pekerjaan.

“Karena di Indramayu itu lapangan pekerjaan minim,” katanya.

Faktor kedua, Sri bilang, berupa fenomena kecemburuan sosial, dimana warga yang melihat tetangganya sukses setelah bekerja di luar negeri, lantas merasa ingin mengikuti jejak itu. Faktor ketiga, adalah iming-i-



ming upah besar, yang dinilai lebih besar dari upah di dalam negeri.

Namun, antusiasme warga Kabupaten Indramayu untuk bekerja ke luar negeri mesti kandas sementara. Peralnya, Sri bilang, pemerintah pusat telah menghentikan pemberangkatan buruh migran ke luar negeri sejak Maret lalu karena pandemi Covid-19.

Terkait penghentian penempatan tenaga kerja ke luar negeri karena pandemi, Siska Karina, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon menanyakan kebijakan yang ditempuh oleh Pe-

merintah Kabupaten Indramayu untuk para calon pekerja migran. “Bagaimana dengan calon pekerja yang sudah siap berangkat?” tanyanya.

Menjawab itu, Sri menjelaskan, bahwa penghentian penyaluran buruh migran ke luar negeri bukan hanya kebijakan Pemerintah Indonesia, tetapi negara-negara tujuan pekerja juga semuanya menghentikan sementara penerimaan tenaga kerja asing. “Para calon pekerja migran saat ini masih menunggu kebijakan dari Pemerintah Pusat,” jelasnya •Sar

Fraksi PDIP Kabupaten Cirebon Berjuang untuk Wong Cilik!

Daerah sulit maju tanpa kebijakan bermutu. Pentingnya mengawal program pemerintah daerah agar tepat sasaran dan transparan. wong cilik harus diperjuangkan dengan baik. Bagaimana Fraksi PDIP Kabupaten Cirebon memperjuangkannya?



Foto: foto: dok pdip

Nafas panjang perjuangan tak pernah berhenti. Merah membara membakar semangat kader-kader terbaik Fraksi PDIP Kabupaten Cirebon. Melaksanakan mandat rakyat, membela *wong cilik* mewujudkan kesejahteraan.

Sudah menjadi kewajiban fraksi membawa fatsun partai. Melaksanakan program partai sesuai tugas dan fungsi lembaga legislatif. "Berjuang untuk kesejahteraan masyarakat. Bagaimana mengawal kebijakan pemerintahan untuk pro kepada rakyat," jelas Mustofa, Ketua Fraksi PDIP

Kabupaten Cirebon.

Pemilu 2019 – 2024 menempatkan delapan kader terbaik PDIP menduduki lembaga legislatif Kabupaten Cirebon. Mayoritas dari mereka merupakan anggota dewan berpengalaman. Sehingga pada periode ini perjuangan dan peran mereka tak perlu diragukan. Gabung bersama mereka satu kursi dari Partai Hanura yang tentu menambah kekuatan perjuangan.

Menempati setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang ada, mereka di tuntut agar bekerja secara maksimal. Men-

jalankan tiga fungsi utama lembaga legislatif; legislasi, pengawasan, dan anggaran. "Setiap anggota harus melaksanakan amanah sesuai tugas dan fungsi," jelasnya.

Perjuangan untuk *wong cilik* dimulai dengan produk perda yang pro rakyat. Mengawal kebijakan pemerintah daerah agar tepat sasaran dan transparan, serta memaksimalkan anggaran agar terserap untuk pembangunan dan kesejahteraan.

Dinamika politik bukan sebuah hambatan, namun justru sebagai tantangan untuk mewu-

judkan harapan. "Perbedaan latar belakang partai politik jangan dijadikan sebagai ladang konflik, tapi harus dibangun perbedaan itu sebagai masukan wawasan berpikir. Sebab banyak menginventarisir pemikiran itu lebih bagus," terangnya.

Mengedepankan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi harus menjadi prinsip setiap anggota dewan. Oleh sebab itu, Fraksi PDIP selalu berupaya agar perjuangan bermuara pada rakyat. Rakyat merupa-

kan pemilik mandat yang harus mendapatkan hak-haknya.

Semangat wakil rakyat harus bergelora sebagaimana yang digaungkan Ketua Umum Partai PDIP "Berpikirlah pada konsitusi karena itulah jalan kenegaraan. Penuhilah janji kampanye, sebab itulah ikatan suci dengan rakyat," Hj. Megawati Soekarno Putri, dalam pidatonya saat pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan di Bali.

Mensolidkan fraksi PDIP dilakukan secara normatif. Me-

reka melakukan rapat bulanan atau sekedar diskusi ringan. "Anggota dewan dalam fraksi itu memiliki satu perasaan, juga berangkat dari partai yang sama. Sehingga tidak perlu lagi diminta untuk solid. Walaupun dalam keseharian ada dinamika," pungkasnya.

Berikut sembilan anggota dewan yang tergabung dalam Fraksi PDIP Kabupaten Cirebon. Dengan semangat berjuang untuk *wong cilik*.



H. Mustofa, SH
Cirebon, 15 September 1974

Rudiana, SE
Cirebon, 11 November 1979

Carila Rohandi, SE
Cirebon, 21 April 1965

Rohayati, Amd
Cirebon, 17 Agustus 1967

Abdul Rohman
Cirebon, 11 Juni 1970



Syahril Rmadhony, SE
Jakarta, 29 Maret 1991

Aan Setyawan, S. Si
Cirebon, 29 Juli 1971

Hj. Amenah, SE
Cirebon, 03 Desember 1971

Yoga Setiawan, SE
Cirebon, 15 November 1991 www

H. Mustofa; Persiapan Matang Untuk Menggapai Tujuan

Setiap tujuan harus ia raih. Sebuah tekad pantang mundur yang dimiliki politisi senior PDIP Kabupaten Cirebon ini. Ialah H. Mustofa atau yang dikenal dengan Jimus. Torehan empat

periode menjadi anggota dewan menjadi bukti kelihaiannya memainkan strategi.

Pengalaman politik terbaiknya saat memimpin DPRD Kabupaten Cirebon periode 2014

– 2019. "Saya pernah memimpin 49 politisi terbaik dari semua partai, itu tidak mudah. Berbagai kepentingan, intrik, dan beragam latar belakang dapat ditangani. Saya tidak mencari perbedaan,



tapi saya mencari persamaan agar anggota DPRD berfungsi dengan baik," jelas Jimus.

Pria kelahiran 15 September 1974 ini gemar berolahraga. Dari banyak jenis olahraga yang ia lakukan, sepak bola, tenis meja, tembak, dan motor trail paling digemari. Alasannya keempat olahraga tersebut membutuhkan adrenalin, kekuatan, ketangkasan, fokus, dan kesabaran.

Bahkan ia memfilosofikan tenis meja dalam frame politis. "Tenis meja memiliki 3 teknik tahapan sebelum memukul bola, yakni pengamatan bola, *timing*, dan pukulan. Jika yang pertama salah maka selanjutnya gagal. Apabila yang pertama berhasil namun *timing* tidak pas, maka pukulan tidak akurat," jelasnya.

"Tapi kalau satu dan dua pas, maka tahap ketiga tergantung niat mau membunuh atau ha-

nya mengembalikan. Begitu juga dalam dunia politik, kita perlu melakukan pengamatan, menentukan *timing* yang tepat, dan baru dapat menentukan keputusan apa yang akan diambil," lanjutnya.

Bukan hanya tenis meja, namun olahraga yang ia lakukan memiliki nilai filosofi dan mengasah dan melatih diri. Seperti olahraga tembak yang butuh konsentrasi dan fokus. Juga motor trail yang harus mampu mengendalikan emosi, "Main motor emosinya tidak dikendalikan ya *njungkel*," ungkapnya.

Olahraga baginya merupakan aktivitas wajib. Sedari muda ia lakukan hingga kini. Tidak heran jika kita lihat sosok Jimus sebagai pribadi energik penuh semangat. Baginya, tubuh yang sehat berkorelasi pada kinerja maksimal untuk rakyat. "Ma-

syarakat berpikir bahwa anggota dewan itu tahu segala-galanya dan jadi tempat untuk solusi. Sehingga kita harus serba siap," jelasnya.

Berkenaan dengan sikap politiknya, ia berprinsip bahwa segala tujuan harus tercapai. Maka hal utama yang harus dilakukan adalah persiapan matang. Ia terbiasa mempersiapkan langkah demi langkah sebelum menentukan tujuan apa yang hendak ia raih.

Sikap ini penting bagi seorang politisi agar ia tidak ceroboh dan gegabah dalam bertindak. Pengalaman empat periode menjadi wakil rakyat mematangkannya menjadi seorang politisi senior yang patut dicontoh. Mengedepankan cara-cara *elegant* dalam menggapai tujuan.

Ada kisah unik yang pernah ia alami. Kala itu ia menerima masyarakat yang datang kerumah dengan maksud meminta bantuan. Setelah tamu masuk, ia lantas menghampirinya. Tamu yang datang tidak langsung menyampaikan maksud tujuan kepadanya, tapi jutru bertanya keberadaan H. Mustofa. Ia pun tersenyum dan menyampaikan bahwa dirinyalah yang dicari.

Pengalaman itu membuatnya merasa bahwa ternyata orang lebih sering mendengar namanya. Namun itu bukan persoalan, sebab kedatangan masyarakat untuk meminta bantuan kerumahnya menjadi indikator bahwa Jimus orang baik. Meskipun secara personal mereka belum saling mengenal.

Diperiode ke empatnya, ia senantiasa memberikan teladan kepada sesama rekan anggota dewan. Saling mengingatkan agar menjadi dewan yang aspiratif. "Setiap anggota harus melaksanakan amanah sesuai tugas dan fungsi," pungkasnya. •Mol

Dolanan Jamblang: Jadul tetap mantul

Benarkah mainan jadul tak menarik? di blok Tegalan, Desa Jamblang, Kabupaten Cirebon, para pengrajin mainan zaman dulu selalu kerepotan memenuhi permintaan pasar. Bagaimana pesona mereka bertahan?



foto: foto mahanaid

Pernahkah anda bermain *klotokan* atau mainan jadul lainnya? Beberapa jenis mainan zaman dulu mungkin telah punah, tergeser oleh modernisasi. Anak-anak millennial lebih kenal mainan digital. Beragam *games* tersedia dalam *gadget* yang mereka genggam. Namun siapa sangka, para pengrajin mainan jadul hingga kini tetap eksis.

Seperti yang ada di blok Tegalan, Desa Jamblang, Kabupaten Cirebon. Banyak pengrajin mainan jadul hingga kini masih bertahan. "Mainan-mainan ini dikenal dengan 'dolanan

jamblang'," jelas Oni, pedagang dolanan jamblang sambil menunjukkan beragam jenis mainan yang ia jual.

Keberadaan pengrajin dolanan jamblang diprediksi telah ada sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Mereka secara turun temurun menjaga dan melestarikan usaha kerajinan mainan. Beragam jenis produk dihasilkan, seperti klotokan, burung-burungan, barongsai, kuda-kudaan, dan lain-lain.

Mainan wayang-wayangan adalah satu dari beberapa jenis dolanan jamblang yang me-

ngalami pergeseran. Terutama dari segi bahan yang digunakan. Jika dulu berbahan dasar kayu, sekarang menggunakan spons. Sebab bahan baku kayu mulai sulit didapatkan.

Bahan baku mainan jamblang di dapatkan dari limbah bahan sandal yang ada di Desa Barepan Kabupaten Cirebon. Selain itu di datangkan juga dari Tangerang. Bahan-bahan tersebut selanjutnya dibentuk sesuai dengan jenis mainan yang hendak dibuat.

Usaha dolanan jamblang mengalami perkembangan cukup signifikan. Terbukti selama



15 tahun Ardila menjadi pengrajin ia tetap *survive* bahkan bertambah maju. “sebelumnya saya punya usaha becak, kemudian berhenti dan memilih menjadi pengrajin dolanan jamblang. Mertua saya juga pengrajin dolanan jamblang,” jelas Ardila.

Senada dengan Ardila, Suhendra pun demikian. “Saya telah sepuluh tahun menjadi pengrajin. Mertua juga sama, dari dulu bikin kerajinan mainan. Alhamdulillah dari tahun ke tahun semakin berkembang walaupun tidak besar” terangnya.

Ardila dan Suhendra merupakan dua dari puluhan pengrajin dolanan jamblang yang ada di blok Tegalan. Mereka bukan hanya sukses memenuhi kebutuhannya, namun berhasil menciptakan lapangan kerja. Memberdayakan masyarakat setempat dan menggeliatkan perekonomian warga sekitar.

Suhendra memiliki tujuh

karyawan harian dengan diberi upah Rp 30rb perhari, ada juga karyawan borongan. Ia men *drop* bahan baku lalu mereka membuatnya menjadi kerajinan. “Lumayan bisa untuk makan bareng, jadi tetangga pada ikut bikin kerajinan,” ungkapnya.

Era globalisasi menggeser ragam lini kehidupan, satu diantaranya adalah permainan. Pesatnya teknologi dan masuknya produk mainan luar negeri memberi dampak bagi mainan lokal. Meski begitu para pengrajin dolanan jamblang tak kehilangan pasar. Mereka tetap diburu oleh konsumen dari berbagai kota.

Pemasaran hasil kerajinan dilakukan dengan beragam cara. Ada yang berinisiatif mencari pasar diluar kota, seperti yang dilakukan Ardila. Adapula yang menanti pembeli dari luar kota, seperti yang dilakukan Suhendra dan Ano. Kesemuanya bermuara pada harapan produk mereka

diterima dan laku dipasaran.

Sebulan Ardila mampu dua kali mengirimkan produk kerajinan dolanan jamblang. Setiap pengiriman mencapai 200 kodi atau setara dengan 4000 item. “Paling banyak ke Solo dan Lampung. kalau Cirebon sendiri tidak ada tempat khusus, paling ya disisinya saja,” jelasnya.

Lain halnya dengan Suhendra, ia lebih banyak di datangi oleh pembeli dari luar kota. “Awalnya orang sini pada jualan muter di kampung-kampung, terus ke Jakarta atau kota lainnya. Nah mungkin disana pada sukses dan ada yang bertanya, akhirnya pada kesini sendiri belanjanya,” terangnya.

Harga untuk tiap produk kerajinan bervariasi. Kerajinan berupa topeng dijual 130 rb per kodi, dengan harga satuan 15 rb. Sementara untuk klotokan 100 rb per kodi. Keuntungan yang diraup cukup besar, yakni



kisaran 7 juta hingga 10 juta sebulan. Dalam satu kali transaksi, biasanya pembeli yang datang rata-rata menghabiskan 2 juta sampai 3 juta.

Permintaan pasar terhadap dolanan jamblang ini cukup tinggi, bahkan pengrajin sampai kualahan. “kadang kita kesulitan memenuhi permintaan pasar. Masalah utamanya sih modal. Ada permintaan tapi kalau bahan baku tidak ada kan susah memenuhinya,” ungkapnya.

Selama ini mereka menggunakan modal pribadi. Tidak ada bantuan atau pinjaman lunak

dari pihak manapun. Sehingga mereka memproduksi sesuai dengan kemampuan modal yang tersedia. “sebetulnya 10 juta itu sudah bisa muter. Tapi kalau mau maksimal dan hasilnya besar ya modalnya juga besar,” jelasnya.

Semangat mereka sangat besar untuk menjaga permainan lokal serta memberdayakan masyarakat sekitar. Sehingga patut kita apresiasi juga dukungan. Caranya adalah dengan turut serta mempromosikan dan membeli produk mereka.

Seperti yang dilakukan oleh Rani, ia mengajak anaknya mem-

beli dolanan jamblang, “Sengaja saya belikan mainan disini supaya anak tidak kecanduan HP. Ini juga bagian dari mengenalkan ke anak tentang permainan saat masa kecil saya,” ungkapnya.

Membeli produk kerajinan dolanan jamblang bukan sekedar membantu mereka, namun turut andil dalam mempertahankan permainan lokal. Mensosialisasikan kepada anak-anak millennial agar tidak hanya paham *games* digital dan permainan modern. Namun juga harus mencintai produk mainan lokal.

•Mol

Mimpi Lebak Mekar Menjadi Kampung Beduk

Bermodal media sosial, kerajinan beduk Lebak Mekar makin mekar. Pemasarannya sudah tembus negara lain. Lantas, seperti apakah rencana desa ini ke depan?



itu banyak beduk bolong karena ditabuh oleh anak-anak. Yang akhirnya harus ditambal dan diperbaiki oleh saya," ujar Ismail saat ditemui.

Akhirnya, Ismail pun mulai mencoba membuat beduk sendiri karena permintaan warga sekitar. Bahkan tak jarang warga meminta tukar tambah beduk. Biaya servis beduk yang ia terima sebesar Rp 3 juta. Kulit beduk bolong dan rusak itu kemudian diganti dengan yang bagus hingga menjadi seperti baru lagi.

Seperti pembuatan beduk pada umumnya, Ismail memilih kayu jati sebagai bahan utama sepenuhnya, serta 70 persen kulit sapi. Kalau pun tidak sepenuhnya kayu jati, itu hanya ia gunakan untuk membuat sanggahan atau kaki Beduknya.

Ismail kini telah mempekerjakan 14 orang karyawan. Empat orang khusus untuk membuat Beduk. 4 orang yang membuat sanggah atau kaki Beduk. Serta 6 orang yang membantu mengangkat barang. Sedangkan ia dan Syarif lebih fokus pada pemasaran.

Untuk memberikan pelayanan yang cepat biasanya Ismail menyiapkan kerangka. "Minimal sudah dikuliti serta diplestur, jadi ketika nanti ada pesanan bisa cepat selesai dalam waktu seminggu. Karena jika buatnya dari awal setiap ada pesanan, pasti akan menghabiskan

Foto: foto: dok Ismail

Lebak Mekar makin terkenal. Desa ini disebut-sebut sebagai daerah pembuat beduk terbesar se-Asia. Sebab itulah sang Kuwu ingin mengembangkan kerajinan itu dalam wadah 'kampung beduk'.

Ada sekitar sembilan orang yang berprofesi sebagai pembuat alat tabuh beduk. Sepanjang sisi jalan, terlihat juga beberapa rumah yang sedang sibuk mengerjakan proses pembuatannya.

Ismail Marzuki salah satunya. Pria jebolan Pondok Pesantren Pare Kediri itu mengaku memulai usahanya membuat beduk sejak masih bujangan. Setelah menikah, ia kemudian berkolaborasi dan bekerja sama dengan ayah mertuanya sendiri, Syarif.

Awalnya, Ismail hanya memperbaiki beduk-beduk yang rusak dari berbagai Masjid di daerah Cirebon. "Kalau Ramadhan sampai hari raya idul fitri



waktu yang lebih lama sekitar 15-20 hari," katanya. Selain membuat beduk, Ismail juga membuat kentongan. Tetapi bukan untuk dijual, melainkan sebagai bonus pembelian beduk.

Untuk 1 beduk kecil, Ismail menjual dengan kisaran harga Rp 3 juta, sedangkan ukuran yang paling besar seharga Rp 130 juta. Harga juga tergantung tujuan pengiriman. "Karena untuk ongkos kirimnya saja, itu ada yang bisa mencapai Rp 25 juta," ungkapnya.

Untuk menggaet pembeli Ismail juga memanfaatkan sosial media: facebook, whatsapp, google, dan youtube. Ide pemasaran usahanya itu, ia dapatkan dari teman-temannya yang sering mengunggah foto mereka di media sosial.

Bukan hanya di sosmed, Ismail pun mencoba membuat *website* halaman untuk usahanya sendiri, hingga banyak orang menyukai usaha yang dijalaniya itu. Akhirnya usaha Ismail mulai berkembang semakin pesat serta dikenal banyak orang.

Dengan proses pemasaran yang menggunakan metode digital, bukan hanya Masjid Agung Sumber Cirebon saja yang menggunakan Beduk buatannya. Ismail juga sampai bisa mengirim beduk hampir ke seluruh nusantara seperti, Jakarta, Makasar, Sulawesi, Aceh, dan Maluku. Ia juga berhasil memasarkan usahanya itu hingga mancanegara yakni, Singapura dan Malaysia.

Selain itu, Ismail juga memiliki akun Youtube aktif yang didalamnya berisi video berdurasi 3-5 menit mengenai proses pembuatan beduk. Karena

menurutnya, hampir 90 persen masyarakat Indonesia tidak bisa memasang dan membuat Beduk serta sanggahnya. Ketika videonya itu diunggah, yang menonton hingga mencapai 5 ribu *viewers*.

Metodenya berselancar di media sosial membuat usaha beduknya itu semakin tumbuh subur. Bukan hanya itu, desanya pun menjadi sangat terkenal. Ia mengaku sudah banyak dari berbagai media yang meliput usahanya itu. Bahkan, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum pun, pernah berkunjung ke tempatnya pada Agustus lalu. Sekitar 30 menit lamanya mereka berbincang.

Ismail bilang, di Desa Lebak Mekar memang banyak yang membuat beduk, itu karena warisan turun-temurun dari para pendahulunya. Sang Kuwu pun berencana membuat desa ini menjadi 'Kampung Beduk' yang diharapkan menjadi potensi pengembangan desa. Selain Beduk, di desa ini juga terdapat tempat pembuatan genjring dan kaligrafi.

• sar



Mohamad Luthfi



Pahlawan Lampu Kuning

Di sebuah perempatan jalan, lampu kuning menyala. Kendaraan di sebelah kanan kami berhenti. Tiba-tiba klakson menyalak terus-menerus, hingga lampu berwarna merah.

Saya menengok ke kanan. Saya menduga, suara klakson itu dari kendaraan di belakangnya. Kebetulan saya duduk di tengah dan posisi mobil agak ke belakang, karena di depan kami ada motor.

Terlihat jelas sang sopir sedang berbincang dengan orang di sebelahnya, tangannya menunjuk-nunjuk lampu lalu lintas. Saya simpulkan sepertinya dia kesal, terhalangi dan tak bisa menerobos lampu kuning.

Sebuah kesal yang tidak pada tempatnya. Tidak bisa melanggar hukum kok kesal. Bagi saya pengemudi di depannya yang taat dan berhenti itu adalah orang merdeka.

Loh kok merdeka? Bukannya kalau merdeka dia bebas menerobos? Berhenti dan menaati aturan itulah kemerdekaan.

Bayangkan jika manusia menganggap kebebasan semauanya sendiri sebagai kemerdekaan, maka muka bumi ini akan dipenuhi dengan kekacauan. Saling memangsa, membunuh, dan tidak ada ketenangan hidup disitu.

Orang selalu was-was, curiga, dan mengganggu musuh orang lain. Pada kondisi itu apakah disebut merdeka? Tentu tidak. Merdeka adalah terjaminnya keamanan dan saling menghormati antara sesama.

Untuk itulah dibuat aturan sebagai perwujudan kemerdekaan, agar orang saling menghormati. Sekaligus, menjamin dan menjaga kemerdekaan setiap orang. Dengan begitu, orang yang taat aturan adalah orang yang merdeka.

Ia merdeka untuk menghormati orang lain, dan menjalankan kesepakatan bernegara. Orang yang melanggar aturan adalah orang yang menindas dirinya sendiri, tidak merdeka. Untuk itulah pelanggaran aturan bisa kena denda dan hukuman, karena bisa menyebabkan orang lain celaka.

Nah, pengemudi merdeka nan taat aturan di

atas, dalam sudut pandang lain, sebenarnya juga seorang pahlawan. Dia lah salah satu pahlawan di era kemerdekaan. Pertama karena dia menghormati kemerdekaan; kedua, menjalankan (memperjuangkan) kebenaran; ketiga menghindarkan diri dan orang lain dari celaka.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Jadi inti dari kepahlawanan adalah 'membela (menjalankan) kebenaran'.

Nah, setiap memasuki November, kita selalu diingatkan tentang hari pahlawan dan kepahlawanan. Di ruang-ruang pembelajaran selalu diceritakan tentang perjuangan Bung Tomo, Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, Imam Bonjol, hingga Cuk Nyak Dien.

Tentu saja hal itu baik dan bagus. Namun, seringkali eksplorasi figur pahlawan yang berani dan berperilaku jagoan lah yang diterima anak-anak dan pembelajar. Hal itulah yang lebih dominan menancap dibenak dan alam bawah sadar, ketimbang aspek menjalankan atau membela kebenaran.

Apalagi, jika cerita itu didukung dengan visualisasi yang heroik, baik berupa gambar maupun video. Lengkap sudah, persepsi bahwa pahlawan adalah jagoan (meski tanpa kebenaran).

Untuk itu marilah kita sama-sama perdalam nilai kebenaran dalam keahlawanan, terutama dalam memberikan pembelajaran kepada generasi penerus. Jagoan saja tidak cukup, tapi harus dilandaskan pada kebenaran.

Sehingga ke depan tidak ada lagi ungkapan: "Wih...hebat, jagoan...lampu merah diterabas!" Namun, diganti dengan ungkapan: "Malu ah menerabas lampu merah, wong lampu kuning saja sudah disuruh bersiap berhenti."

Selamat menjadi orang merdeka. Selamat menjadi pahlawan. Mulailah dari lampu kuning.

Selamat hari pahlawan! Merdeka!



**SEKRETARIS DPRD
DAN SELURUH PEGAWAI**

Mengucapkan:



**Selamat Hari
PAHLAWAN
NASIONAL**

1 0 N O V E M B E R



PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Mengucapkan:

Selamat Hari

PAHLAWAN NASIONAL



10 NOVEMBER

